

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN ORGANISASI, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI TERHADAP KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)

Oleh:

M luthfi iznillah

Pembimbing : Nur azlina dan Alfiati silfi

Faculty of economics, riau university, pekanbaru, Indonesia
e-mail : lutfi.iznillah@gmail.com

The influence of the quality of human resources , the commitment of the organization , information technology , and communication on the readiness of the government in applying accrual government accounting standards based

ABSTRACT

The enactment of government regulation number 71 year 2010 about government accounting standards based accrual and also enactment permendagri 64 2013 about the application of government accounting standards based accrual on regional government bring big changes in financial reporting system in indonesia , namely change from the base cash toward accrual become the bases full in accrual recognition government financial transactions .This research aims to analyse the influence of variable quality of human resources, the commitment of the organization , information technology , and communication against readiness of local governments in applying the government accounting standards based accrual. This research conducted in Indragiri Hilir district using data primer namely data from questionnaires filled by respondents.Object used in this research is a work unit (skpd) particularly office, the agency and the department under the district government Indragiri Hilir.The population in this research was all of the employee of financial management agency on the office and environment agency in the district government Indragiri Hilir.Of respondents selected with the methods of sampling purposive, data analysis in this research using methods regression analysis program double with a version of windows spss 17.0 The result of the research indicated that the variable the quality of human resources and commitment of its effect on organization readiness in applying the government accounting standards based accrual .While variable information technology and variable communication did not influence

keywords: government accounting standards ,accrual based, readiness of the government , the quality of human resources , the commitment of the organization , information technology , and communication

I. PENDAHULUAN

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di

Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-

undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Penerapan basis akuntansi akrual dipandang sebagai bagian reformasi manajemen keuangan dan birokrasi, reformasi seperti itu telah digalakkan oleh aparat pemerintah, khususnya Departemen Keuangan yang menjadi barisan paling depan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kementerian-kementerian lain dalam birokrasi penulis yakin akan segera mengikutinya, sepanjang perubahan tersebut akan menyebabkan ke arah budaya organisasi yang lebih akuntabel. Hal ini dapat terlihat dari minat mereka pada saat ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi pemerintah pada saat Departemen Keuangan melaksanakan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah yang dimulai sejak tahun 2007 untuk satuan kerja di Kementerian Keuangan dan mulai tahun 2008 untuk satuan kerja di kementerian lain diluar Depertemen Keuangan.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak

kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Sejak tahun 2010 telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (Siadinda) Online, penggunaan sistem yang terkoneksi ini, dimulai dari menyusun anggaran sampai dengan pertanggung-jawaban pelaksanaan, sehingga masing-masing SKPD dapat lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan melalui penggunaan Siadinda online (riaustrust.com). Melihat dari fenomena ini maka setidaknya Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki kesiapan dari segi tekhnologi informasi untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Simanjuntak dalam Ardiansyah ,2012). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri yang merupakan penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi (hardware dan software) yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Aldiani (2010) juga berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa

tersedianya computer dan software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan informasi yang berkualitas. Perubahan pengelolaan keuangan negara yang lebih akrual dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Selain ketiga faktor di atas juga diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Komunikasi harus dilakukan baik dengan pihak eksternal maupun dengan pihak internal, sehingga penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

1.1 Perumusan Masalah

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua?
2. Apakah komitmen organisasi yang ada dipemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua?
3. Apakah teknologi informasi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua?
4. Apakah tata cara komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji pengaruh variabel Kualitas Sumber daya manusia,

Komitmen Organisasi, Teknologi informasi dan Komunikasi terhadap kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. yang memiliki hasil berbeda satu dengan lainnya dengan penerapan di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Untuk memperdalam hasil penelitian sebelumnya dengan menambah deskriptif mengenai hasil penelitian, sehingga tidak hanya melihat dari hasil uji regresinya.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktek

Hasil dari riset akan mempunyai kontribusi untuk memberikan bahan pertimbangan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sehingga dapat menerapkan basis akrual secara maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berbasis akrual dengan meninjau kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapannya. Perbaikan praktek diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

2. Kontribusi Kebijakan

Hasil riset akan memiliki kontribusi kebijakan mendukung Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan kebijakan – kebijakan lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dipertimbangkan setelah melihat riset yang telah dilakukan

3. Bagi Pemerintah Daerah:
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang cara yang terbaik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

4. Bagi Akademisi:
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

3. Bagi Peneliti:
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Menurut Mahsun et al (2013) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP dengan mengacu pada praktek-praktek terbaik internasional,

diantaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemeritahan pusat/daerah, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksudkan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (www.wikiapbn.com).

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam

pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

2.1.2 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu, badan akuntansi keuangan negara (BAKUN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan Siregar, 2001). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.1.3 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan dilingkungan pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementerian maupun di pemerintah daerah (Pemerintah

Daerah) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Basis Akuntansi Akrua

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP dalam Faradillah (2013) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

2.1.4 Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi peraturan.

Armenakis dalam (Wiyono:2008) mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt dalam (Wiyono:2008) adalah Sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh:

apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah *status quo*.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan.

Menurut Edwar dalam (Abdalla:2010) ada empat variabel baik langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi yaitu:

1. Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Disposisi

Disposisi atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, karena sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

3. Sumber Daya manusia

Menurut Wibowo (2007) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

4. Struktur Birokrasi

Rourke dalam (Nurbarani:2009) mendefinisikan birokrasi sebagai sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (*written procedures*), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh

orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

2.1.6 Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
3. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri,2010).

2.1.7 Komitmen Organisasi

Komitmen berarti kemauan dari penerimaan. Seorang individu mau bekerja keras untuk objek, sasaran-sasaran dan nilai-nilai tertentu, atau dia menjadi anggota dalam sebuah system. Konsep komitmen organisasi telah didefinisikan dan diukur dengan berbagai cara yang berbeda. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi

menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi (Ferris dan Aranya, 1983). Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah Aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari Aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

2.1.8 Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto, 2012). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet*, *intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson dalam Indriasari, 2008). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar.

2.1.9 Komunikasi

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi, salah satunya adalah

komunikasi. Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Komunikasi berasal dari bahasa Latin "Communis" yang berarti sama (common), maksudnya penyampaian gagasan / idea dengan menetapkan terlebih dahulu titik temu yang sama. Flippo dalam Gibson (2000) membuat definisi komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu idea dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Komunikasi mempunyai lingkup yang luas dan komprehensif. Komunikasi dipandang sebagai suatu proses yang dinamis. Menurut Robbins (2006), komunikasi di dalam organisasi sering digambarkan sebagai komunikasi formal. Komunikasi formal mengacu pada komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi (struktur organisasi). Arah komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi ke bawah (komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke para karyawan), komunikasi ke atas (komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer), komunikasi lateral (komunikasi yang terjadi diantara sesama karyawan ke manajer), komunikasi diagonal (komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi).

2.2 Pengembangan Hipotesis Pengaruh antara kualitas sumber daya manusia dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual

SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis

akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga bahwa :

H1 : sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh antara komitmen organisasi dengan dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu agar dapat meenunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi (Aldiani,2010). Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan.

Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja.

Berdasarkan hal diatas penulis menduga hipotesa sebagai berikut :

H2 : Komitmen Organisasi akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

pengaruh antara teknologi informasi dengan dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual

Teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013) yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi

informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2010) dan Romilia (2011) bahwa perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005.

Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut :

H3 : Teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh antara komunikasi dengan dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H4: Komunikasi akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada SKPD Di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir. Responden yang dipilih dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang menjadi pelaksana pengelolaan keuangan langsung yaitu Pejabat pembuat komite (PPK), Kuasa pengguna anggaran (KPA), Pejabat pelaksana teknis kegiatan, (PPTK) dan Bendahara pengeluaran

pembantu (BPP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. hasil uji kualitas data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid.
2. Bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid.

Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan persamaan $N-2 = 81-2 = 79 = 0,219$. Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel kesiapan pemerintah daerah.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan untuk semua variabel dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,

2005). Kriteria pengujian uji reliabel adalah sebagai berikut : (Ghozali, 2005)

- *Cronbach Alpha* $> 0,6$
Konstruk (variabel) memiliki reliabilitas
- *Cronbach Alpha* $\leq 0,6$
Konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dilakukan atas data yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Kesiapan Pemerintah Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi adalah sebagai berikut. disajikan pada Tabel berikut ini :

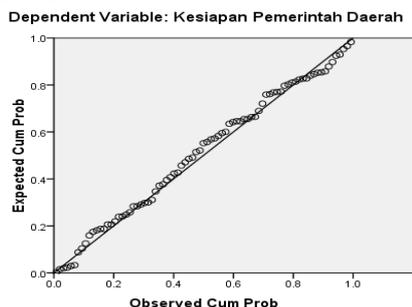
Dilihat dari hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel baik variabel Kesiapan Pemerintah Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi lebih besar 0,60 sehingga dikatakan reliabel.

4.2 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Didalam penelitian ini disajikan dalam graafik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005) yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Hasil uji normalitas dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar hasil pengujian asumsi normalitas dengan p-plot

Dengan melihat tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikut arah garis diagonal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.3 Hasil uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah Uji Glesjer. Kriteria dari uji Glejser adalah apabila nilai statistik dari seluruh variabel masing-masing memiliki nilai p value >0.005 , sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian variabel tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan data tersebut dapat dikatakan bersifat homoskedastisitas.

Dari hasil pengujian diketahui nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* $> 0,05$. Artinya tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Dari hasil perhitungan analisis data, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan Model regresi berganda dengan hasil sebagai berikut:

- Nilai koefisien regresi variabel teknologi informasi sebesar 0,048. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan teknologi informasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kesiapan pemerintah daerah sebesar 0,048 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel komunikasi sebesar 0,001. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan komunikasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kesiapan pemerintah daerah sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

Adapun hasil dari pengujian analisis regresi berganda dalam menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis 1 :Sumber Daya Manusia Akan Berpengaruh

Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai (4,436) dan ρ value senilai (0,000). Diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan Persamaan berikut:

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\ &= 81 - 4 - 1 : 0,05 / 2 \\ &= 76 : 0,025 \\ &= 1,992 \end{aligned}$$

keterangan: n : jumlah
 k : jumlah variabel bebas
 1 : konstan

Dengan demikian diketahui t_{hitung} (4,436) > t_{tabel} (1,992) dan ρ value (0,000) < (0,050). Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu variabel kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua Artinya pemerintah akan siap menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua apabila masing-masing pegawai bagian keuangan telah berkualitas.

Hipotesis II : Komitmen Organisasi akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

Dengan demikian diketahui t_{hitung} (3,137) > t_{tabel} (1,992) dan ρ value (0,002) < (0,050). Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu variabel Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua Artinya pemerintah akan siap menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua apabila masing-masing pegawai bagian keuangan telah berkomitmen dalam

menghadapi perubahan.

Hipotesis III: Teknologi Informasi Akan Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan didapat nilai t_{hitung} senilai (0,454) dan ρ value senilai (0,651). Diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % .

Dengan demikian diketahui t_{hitung} (0,454) < t_{tabel} (1,992) dan ρ value (0,651) > (0,050). Maka dapat disimpulkan **H₃ ditolak** yaitu variabel teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua.

Hipotesis 4: Komunikasi Akan Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai (0,015) dan ρ value senilai (0,988). Diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed)

Dengan demikian diketahui t_{hitung} (0,015) < t_{tabel} (1,992) dan ρ value (0,988) > (0,050). Maka dapat disimpulkan **H₄ ditolak** yaitu variabel Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua Artinya Tata cara komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir tidak memiliki pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrua.

c.) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai

dengan satu. Apabila nilai R^2 semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Apabila nilai R^2 mendekati satu, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.16, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,511. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel kesiapan pemerintah daerah adalah sebesar 51,1 %. Atau variabel independen hanya mampu menjelaskan sekitar 51.1% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 48,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Seperti ukuran satuan kerja (Kusuma, 2013), Budaya Organisasi (Faradillah, 2013), aturan hukum (Ardiansyah, 2012), dsb.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Bahwa variabel Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
3. Bahwa variabel Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
4. Bahwa variabel Komunikas tidak

berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim ke responden terpilih.
2. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya 51,1%. Hal ini menunjukkan masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Jika akan melakukan penelitian tentang kesiapan SAP berbasis akrual, sebaiknya untuk mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik atau jika dimungkinkan dapat menambahkan variabel lain seperti sarana pendukung, regulasi, budaya organisasi dan lainnya.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:
 - a. Untuk melakukan sosialisasi sistem akuntansi basis akrual kepada seluruh SKPD
 - b. Pimpinan SKPD harus mulai membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada penerapan sistem akuntansi basis akrual.
 - c. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah,

- d. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai proses penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi basis akrual kepada pegawai bagian keuangan.
2. Bagi penelitian selanjutnya
 1. hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan supaya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena yang terjadi di pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah,
 2. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas (pemerintah pusat) atau lingkup di daerah lain yang berbeda karakteristiknya.
 3. jika ingin melakukan penelitian tentang kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dapat menambahkan variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Akuntansi pemerintahan: implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah*. Jakarta: Kencana
- Ayu Febriyanti Puspitasari, 2012. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011". Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Abdullah, Syukriy. (2009). *Kendala Penerapan SAP oleh Pemerintah Daerah*. www.syukriy.wordpress.com
- Aldiani, Sulani. (2009). Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Simposium Nasional XII*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Ardiansyah (2012) . *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (studi pada unit kerja KPPN Malang)* . Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Boedijoewono, Noegroho. (2007). *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis Jilid 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Damayanti, Etrin. (2012). *Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007 – 2009*. Skripsi, Universitas Indonesia , Jakarta.
- Erlina, Rosdianto. 2013. *Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual*. Medan: brama adrian
- Faradillah, Andi (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. BP Undip, Semarang.
- Gibson et al., (2000). *ORGANIZATION :Behavior*,

- Structure, Processes, 10th edition.* McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Halim, Abdul. (2004). *Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah : Dua Pilar utama Manajemen Keuangan Daerah* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba empat
- Hariyanto, Agus. (2012). *Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. STIE Dharma Putra, Semarang.
- Indriasari, Desi (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
- Ichsan, Muhammad. (2010). *Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan : Pondasi bagi Penerapan Akuntansi Biaya*. <http://www.scoresociety.com/component/content/article/36-tulisan/66-basis-akrual-akuntansi-pemerintahan>
- Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Junaidi. (Mei 2010). *Statistik*. <http://junaidichaniago.wordpress.com/tag/statistik/>
- Mahsun et al. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi ketiga*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Nazier, Daeng. (22 Juli 2009). *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*. Seminar Nasional. www.bpk.go.id
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martiningsih. (2008). *Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah*. Skripsi. Universitas Mataram, Mataram.
- Indah. (2008). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasinya*
- Novalina, Eka. (2011). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sampang)*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Nugraha. (2013). *Persepsi Akuntan Perusahaan terhadap Kepatuhan Akuntan Public atas Kode Etik di Provinsi Bali*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. (2013) *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Penerbit Mediakom, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2010

- tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2012). *Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Putri. (2012). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Peemda Kab. Bengkalis*. Skripsi. Univeristas Sriwijaya, Bengkalis.
- Rahayu, Siti. (2009). *Penggunaan Metode Durbin Watson dalam Menyelesaikan Model Regresi yang Mengandung Autokorelasi*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Robbins, Stephen P. (2006) . *Perilaku Organisasi, Edisi ke-10*. PT. Indeks, Jakarta.
- Romilia, Riana. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Bangkalan*. Skripsi. STIE Perbanas, Surabaya.
- Sari. (2011) . *Pengaruh pengendalian Internal terhadap transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Sekaran, Uma. (2009). *Research Methods for Business : A Skill – Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Sekaran,uma. 2009. *Reserach methode for business*. Jakarta: Salemba empat
- Seminar Nasional. (19 Maret 2011) . *Audit Sektor Publik : “Peran SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Auditor Eksternal dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Audit Keuangan Daerah”*. www.umy.ac.id
- Suhardjanto dan Yulianingtyas. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sukmaningrum.(2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tempo Interaktif. (5 April 2011) .Akuntan tak harus berpendidikan akuntansi. www.tempo.com . (18 September 2012). SAP Akrual Mulai 2015. <http://www.dppka.jogjaprovo.go.id/cmsakuntansi/>
- www.inhilkab.go.id